

**Transformasi Sosial Budaya Masyarakat pada Implementasi Program
Smart Village dalam perspektif *Smart Governance*.**

Agus Widiyarta¹, Ananda Haniyuhan², Katerina Bataha³

^{1,2,3} Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

agus_widiyarta.adneg@upnjatim.ac.id¹, ananda.haniyuhana@gmail.com²

ABSTRACT.

Smart Village is defined as a service that utilizes information technology in carrying out various activities in the village and is managed by the community effectively and efficiently. Limpung Village is one of the pilot villages for the implementation of the smart village program in Batang Regency. The existence of the implementation of the smart village program has created changes in the order of public services that concern the interests of the wider community in Limpung Village. This study aims to examine the influence of the implementation of the smart village program in relation to socio-cultural transformation in a smart governance perspective. The data in this study will be obtained by means of interviews and observations and presented with a qualitative descriptive method. The results of this study can be seen that in the perspective of smart governance which is one of the components of the smart village concept in relation to the implementation of the smart village program, it has created a social transformation of society seen from the cultural background and the direction of socio-cultural transformation. In the focus of the cultural background, a significant influence occurs in a pattern of community transformation that previously carried out public services manually, now starting to switch to using digital methods. In terms of direction and socio-cultural transformation, it shows that the implementation of the smart governance component is aimed at creating an advanced society in accordance with the era of society 5.0.

Keywords: Publik Policy, Smart Village, Socio Cultural Transformation.

ABSTRAK.

Smart Village diartikan sebagai layanan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam melakukan berbagai kegiatan di desa dan dikelola oleh masyarakat secara efektif dan efisien. Desa Limpung merupakan salah satu desa percontohan implementasi program desa pintar di Kabupaten Batang. Adanya penerapan program desa pintar telah menciptakan perubahan tatanan pelayanan publik yang memperhatikan kepentingan masyarakat luas di Desa Limpung. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh implementasi program *smart village* dalam kaitannya dengan transformasi sosial budaya dalam perspektif *smart governance*. Data dalam penelitian ini akan diperoleh melalui wawancara dan observasi serta disajikan dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini terlihat bahwa dalam perspektif *smart governance* yang merupakan salah satu komponen konsep *smart village* dalam kaitannya dengan implementasi program *smart village* telah menciptakan transformasi sosial masyarakat dilihat dari latar belakang budaya. dan arah transformasi sosial budaya. Pada fokus latar belakang budaya, pengaruh signifikan terjadi

pada pola transformasi masyarakat yang sebelumnya melakukan pelayanan publik secara manual, kini mulai beralih menggunakan metode digital. Dari segi arah dan transformasi sosial budaya menunjukkan bahwa penerapan komponen *smart governance* ditujukan untuk menciptakan masyarakat maju sesuai dengan era society 5.0.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Desa Cerdas, Transformasi Sosial Budaya.

PENDAHULUAN

Smart village diartikan sebagai layanan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam melakukan berbagai aktivitas yang ada di desa dan dikelola oleh masyarakatnya secara efektif dan efisien. Desa pintar atau *smart village* adalah konsep yang menekankan bahwa masyarakat desa yang berada di dalam komunitas tersebut dapat mengatasi permasalahan yang terjadi di wilayahnya dengan cara memanfaatkan potensi sumber daya yang dimilikinya secara cerdas, bijak, dan efisien serta mengangkat adat istiadat budaya setempat, dan norma-norma yang berlaku .

Selanjutnya dasar pengembangan *smart village* juga tidak hanya memiliki fokus dalam menerapkan kecanggihan teknologi di suatu desa saja, melainkan merujuk pula dalam menciptakan perubahan situasi desa menjadi lebih berkualitas dan sejahtera dengan cara memanfaatkan secara maksimal pengelolaan sumberdaya yang dimilikinya dengan berkelanjutan. Konsep *smart village* kemudian dapat diartikan juga sebagai suatu kesatuan yang tidak terlepas dari pengembangan konsep *smart city*. Hanya saja dalam konsep smart village akan berfokus pada unit pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan yaitu pada wilayah desa. Sebab sebagai unit pemerintahan terkecil, desa memerlukan pula suatu pengembangan pembaharuan terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi .

Pada penerapannya, dalam konsep *smart village* terdapat lima komponen utama diantaranya adalah *smart governance*, *smart mobility*, *smart envirointment*, *smart economy*, dan *smart tourism*. Komponen smart governance pada dasarnya terdiri dari beberapa aspek yang ada di dalamnya, diantaranya adalah; pelayanan publik, sistem informasi desa, dan pengelolaan dana desa (Santoso et al., 2019;Herdiana, 2019; Subekti & Damayanti, 2019;dan Rachmawati, 2018). Para sosiolog telah menyederhanakan pemahaman transformasi sosial-budaya atau dinamika budaya (cultural dynamics) (Tarasov, 2016) atau evolusi dan transformasi (evolution and transformation) (Kazlev, 2009), yang menghasilkan tipologi masyarakat dalam tipe-tipe masyarakat pramoderen atau pra-industrial dan tipe masyarakat moderen atau industrial (Lenski, 1966; Lenski & Lenski, 1974; Ritzer, Kammeyer, Yetman, 1979; Vago, 1989; Giddens, 1991). Masyarakat Pascaindustrial (*Postindustrial Societies*), sesungguhnya adalah tahapan akhir dari masyarakat industrial, yang setidak-tidaknya berkembang mulai pada akhir

abad ke-20 dan mencapai puncak kemajuannya pada abad ke-21. Selain dukungan manajemen dan teknologi sebagaimana dicapai oleh masyarakat industrial dengan aktivitas-aktivitas industri manufaktur, pemrosesan, pengolahan (*manufacturing/processing industries*), masyarakat pascaindustri pada abad ke-21 mengembangkan keunggulan teknologi informasi (*information technology*) yang meliputi teknologi keuangan (*financial echnology/fintech*) dan teknologi media sosial (*social media technology*).

Masyarakat pascaindustrial (*postindustrial societies*) merupakan kelanjutan dari masyarakat industrial (*the advancement of industrial societies*) yang berkarakteristik masyarakat penyedia industri jasa (*service industry*), dengan unggulan teknologi informasi (*information technology*), terutama teknologi keuangan (*financial technology/fintech*) dan teknologi media sosial (*social media technology*), selain berbagai teknologi peralatan-peralatan supercanggih (*super-sophisticated equipment technology*). Masyarakat industrial dan masyarakat pascaindustrial seperti di Indonesia, sesungguhnya berlatar belakang atau berbasis masyarakat pertanian dan perkebunan, bahkan meliputi masyarakat pemburu hewan, termasuk ikan dan pengumpul hasil tanaman dan tumbuh-tumbuhan liar, di darat maupun di laut, dan di udara, hingga saat ini. Mempertimbangkan transformasi sosial budaya dengan tahapan-tahapan yang dicapai dalam tipologi masyarakat pra-moderen dan moderen, agaknya masyarakat-masyarakat di wilayah kepulauan Indonesia pun mengalaminya, bahkan hingga sekarang semua tipe masyarakat tersebut masih hidup: sebagian seperti tipe-tipe masyarakat pemburu-pengumpul, seperti pemburu hewan di hutan dan semak-semak, dan nelayan tradisional tradisional, serta masyarakat pengumpul hewan dan penggembala dan pekebun, menjadi tipe peninggalan budaya di banyak wilayah yang maju maupun yang hampir punah; sebagian lagi seperti tipe-tipe masyarakat pekebun, masyarakat pertanian dan masyarakat tradisional, atau tipe masyarakat pertanian-tradisional atau tradisional-pertanian, atau pertanian tradisional-feodal, masih hidup dan berkembang, hidup bersama sebagai suatu entitas bangsa, yang hidup di wilayah-wilayah terpencil-pedalaman-terasing, di desa-desa, desa-desa-kota, di kota-kota kecil, bahkan di kota-kota besar dan metropolitan. Berbagai tipe masyarakat ini semua menjadi bangsa Indonesia. Transformasi sosial-budaya bagi masyarakat-bangsa Indonesia harus diperlakukan, dibayangkan dan dicita-citakan secara khusus dengan mempertimbangkan latar-belakang historis yang sudah menjadi pengalaman bangsa dan latar budaya yang merupakan realitas yang dimiliki masyarakat masyarakat di Indonesia dan sekitarnya, sehingga setidaknya-tidaknya 2 (dua) masalah sosial-budaya harus diperhatikan.

Pemerintah Kabupaten Batang pada Implementasinya, menerapkan program smart village pada 56 desa percontohan (*pilot project*). Desa Limpung menjadi salah satu

desa percontohan (*pilot project*) implementasi program *smart village* di Kabupaten Batang. Hal ini dikarenakan berdasarkan data yang ada dinyatakan bahwa sumber daya manusia maupun akses internet sudah memadai bagi penerapan *smart village* di Desa Limpung. Pertimbangan lain yang menjadikan Desa Limpung menjadi salah satu desa percontohan atau desa induk implementasi *smart village* dikarenakan Desa Limpung merupakan salah satu desa dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi di Kecamatan Limpung..

Transformasi Sosial Budaya Masyarakat dalam Proses Kelembagaan

Dalam peradaban perkembangan manusia sebagai makhluk sosial akan terjadi proses transformasi budaya. Yang dimaksud dengan Transformasi sosial budaya adalah konsep ilmiah atau alat analisis untuk memahami perubahan dunia setidaknya dalam dua kondisi yakni keadaan pra modern atau pra perubahan dan keadaan pasca perubahan atau modern (Tarasov, 2016). Dalam perkembangannya perkembangan budaya mempunyai keterkaitan dengan perkembangan kebiasaan di masyarakat.

Kemajuan teknologi dan pengetahuan akan mempengaruhi perkembangan transformasi sosial budaya, sehingga mempengaruhi nilai-nilai budaya lama. Transformasi sosial budaya dipengaruhi oleh masuknya nilai-nilai budaya baru yang ada di masyarakat. Interaksi sosial budaya berpijak pada perkembangan budaya dan pengetahuan di masyarakat. Dalam teori ini terkandung pemahaman bahwa fakta dibangun secara sosial, serta fakta dan pengetahuan merupakan dua istilah kunci untuk memahami perubahan interaksi sosial budaya di masyarakat. Fakta adalah suatu kualitas yang terdapat dalam fenomena-fenomena yang diakui keberadaannya. Sehingga fakta tidak tergantung kehendak manusia. Pengetahuan adalah kepastian bahwa fenomena itu nyata dan memiliki karakteristik yang mempengaruhi adanya perubahan interaksi sosial budaya masyarakat (Berger, 2019).

Kesadaran dalam diri setiap individu dalam masyarakat mengakibatkan terjadinya perubahan interaksi sosial di masyarakat. Pada dasarnya kesadaran masyarakat terhadap perubahan interaksi sosial didasarkan pada pengetahuan, pola pikir dan pola perilaku masyarakat dalam menyikapi perkembangan pengetahuan. Kenyataan sehari-hari masyarakat dibentuk oleh interaksi dan komunikasi antar individu di masyarakat dalam memaknai perkembangan pengetahuan dalam penerapannya pada kebiasaan yang ada di masyarakat (Berger, 2019)

Smart Village* dalam Perspektif *Smart Governance

Smart village merupakan sebuah layanan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam melaksanakan aktifitas desa yang dikelola oleh masyarakat desa secara efektif dan efisien. Desa pintar atau *smart village* merupakan pengembangan konsep dimana masyarakat desa berada dalam suatu komunitas yang mengatasi permasalahan wilayah dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimilikinya secara cerdas, bijak, dan efisien serta mengangkat adat istiadat dan budaya setempat, serta norma-norma yang berlaku (Baru, Djunaedi, & Herwangi, 2019). Perlu adanya suatu konstruksi konseptual yang mendasar pada karakteristik wilayah desa dalam menerapkan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga desa mampu menciptakan sinergitas antara pemerintah, masyarakat dan lingkungan dengan mendasar pada nilai, karakter dan norma yang dimiliki desa (Herdiana, 2019). Sebuah konsep *smart village* (desa pintar) bisa dijadikan solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Dengan mengadopsi komponen *smart city*, maka bukan hal yang mustahil jika dari desa akan muncul kekuatan ekonomi nasional berbasis UMKM, sumber daya manusia yang unggul, pemerintahan yang bersih dan transparan, serta lingkungan sosial yang baik

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hal ini dikarenakan data yang dihasilkan dalam penelitian ini berupa data deskriptif sehingga tidak bisa diwakilkan dengan angka/statistika. Data yang dihasilkan dari penelitian ini akan memuat penjelasan lebih rinci yang disesuaikan dengan hasil observasi dan wawancara yang ada di lapangan.

Lokasi penelitian pada penelitian ini akan berfokus di Desa Limpung, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah dengan waktu pengambilan data dimulai dari Bulan September hingga November 2022. Pemilihan Limpung sebagai lokasi penelitian sebab Desa Limpung merupakan salah satu desa potensial yang menjadi plot project program smart village. Selain itu, latar belakang masyarakat Desa Limpung yang heterogen juga menjadi alasan apakah akan terjadi suatu transformasi sosial budaya setelah diterapkannya program smart village. Kemudian jika benar terjadi transformasi sosial budaya maka transformasi ini mengarah ke arah positif atau negatif bagi perkembangan peradaban masyarakat Desa Limpung.

Kemudian proses analisis data akan dilakukan dengan cara klasifikasi dan sistematisasi beragam fenomena sosial-budaya yang mengalami transformasi selama implementasi program smart village terutama dalam hal mengetahui kategor dari beragam unsur budaya masyarakat Desa Limpung yang mengalami negosiasi atau dialektika. Analisis data berikutnya dilakukan dengan cara mendeskripsikan ulang

pandangan ahli mengenai konsep maupun istilah serta simbol yang berkenaan dengan transformasi sosial-budaya untuk menyesuaikan diri dengan penerapan smart village dan tuntutan digitalisasi pelayanan publik. Hal ini dimaksudkan untuk memahami perangkat pengetahuan yang bersifat sosial atau kolektif yang dipakai oleh masyarakat setempat dalam mendialektikakan budaya dan penyesuaian proses sosial dalam kaitannya dengan digitalisasi di berbagai sektor layanan publik atau masyarakat secara luas

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perspektif *Smart Governance* dalam Implementasi *Smart Village*.

Komponen *smart governance* pada dasarnya terdiri dari beberapa aspek yang ada di dalamnya, diantaranya adalah; pelayanan publik, sistem informasi desa, dan pengelolaan dana desa . Pada implementasinya, komponen *smart governance* dalam program *smart village* diterapkan dengan perubahan digitalisasi pelayanan publik dimana sebelumnya menggunakan alur secara manual. Proses digitalisasi pelayanan publik ini dilakukan melalui penggunaan website desa sebagai media pelayanan publik dan sebagai awal digitalisasi pelayanan publik. Selain pemanfaatan website desa, Pemerintah Desa Limpung juga melakukan inovasi berupa transformasi pelayanan publik dengan menggunakan media sosial *whatsapp* dalam proses pelayanan administrasi.

Penggunaan *website* dan *whatsapp* dalam proses pelayanan publik ini dilakukan sebagai percobaan sebelum aplikasi pelayanan publik terintegrasi diterapkan di Desa Limpung sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Desa Limpung, Bapak Yogi Aditia, S.H., sebagai berikut :

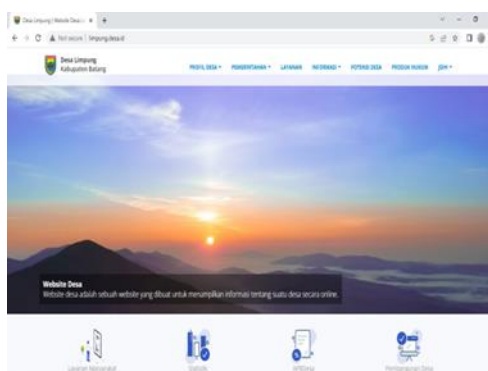
“Dalam penerapan smart village sekarang kami sudah menerapkan media whatsapp sebagai salah satu media pelayanan publik, jadi sebelum masyarakat melakukan permohonan pelayanan publik ke Kantor Desa terlebih dahulu melakukan permohonan melalui whatsapp supaya nanti tinggal menunjukkan bukti (pesan) whatsapp untuk kemudian kami proses.” (Hasil wawancara tanggal 3 November 2023).

Berdasarkan penjelasan tersebut dan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis didapati hasil dimana penerapan smart governance sudah mulai dikembangkan di Desa Limpung dengan melalui website desa sebagai pusat informasi, selain itu media whatsapp juga digunakan sebagai layanan permohonan pelayanan publik. Penggunaan aplikasi whatsapp sebagai platform untuk mengajukan permohonan pelayanan publik disebabkan karena aplikasi ini adalah aplikasi yang banyak digunakan oleh masyarakat di Desa Limpung, serta penggunaannya sebagai cara untuk mengenalkan masyarakat pada digitalisasi pelayanan publik. Hal ini dilakukan agar saat aplikasi pelayanan publik

terintegrasi diterapkan, masyarakat sudah mengerti proses pelayanan publik secara digital.

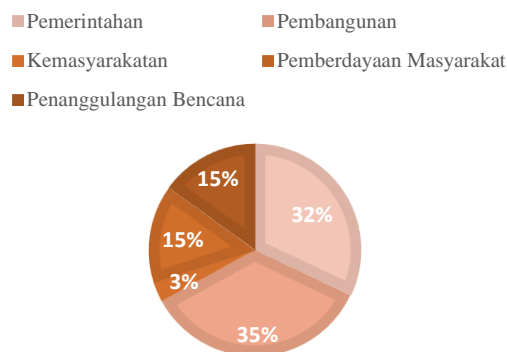
Terkait sistem informasi desa sebagaimana menjadi salah satu unsur dalam penerapan smart governance pada implementasi program *smart village* di Desa Limpung telah diterapkan dengan penggunaan laman resmi (website) sebagai pusat informasi dari mulai update kegiatan yang dilaksanakan desa, hingga data – data seperti penggunaan APBDesa dapat diakses melalui website tersebut. Selain itu, pada laman resmi juga memuat kontak yang dapat dihubungi oleh masyarakat dalam kaitannya dengan pelayanan publik melalui whatsapp.

Gambar 1. Tampilan Sistem Informasi Desa Limpung.



Kemudian berdasarkan konsep smart governance terdapat unsur lain atau unsur ketiga yang perlu dinilai dalam penerapan konsep tersebut yaitu terkait pengelolaan dana desa yang penulis tampilkan dalam grafik berikut ini;

Grafik 1. Alokasi Dana Desa Pemerintah Desa Limpung Tahun 2022



Berdasarkan grafik tersebut alokasi dana desa terbesar digelontorkan untuk pembangunan desa. Pembangunan disini bukan hanya pembangunan bagi infrastruktur saja, melainkan pembangunan sistem informasi desa menuju Limpung smart village. Hal ini sebagaimana hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dan disampaikan oleh key informan dan juga informan sekunder bahwa saat ini Desa Limpung tengah bersiap untuk menggunakan sistem pelayanan publik terintegrasi dengan dinas - dinas terkait. Selain itu, data yang terdapat pada RPJMDes (Rencana Pembangunan Menengah Desa) juga memperlihatkan adanya bukti terkait perencanaan pembangunan Sistem Informasi Desa yang terintegrasi. Pada realisasinya, saat ini Pemerintah Desa Limpung masih melakukan percobaan dengan menggunakan media whatsapp agar masyarakat memahami terlebih dahulu terkait digitalisasi pelayanan publik.

Penjabaran dana desa pada tahun 2022 jika diperinci adalah dimana pendapatan desa diperoleh sebanyak Rp. 1.802.674.100. Sedangkan untuk total belanja di tahun 2022 yaitu menghabiskan dan Rp. 1.915.798.760. Dalam hal ini Pemerintah Desa Limpung mengalami defisit yaitu sebanyak Rp. 113.124.660. Total belanja untuk pelaksanaan pembangunan sendiri memakan biaya Rp. 669.999.000. Apabila didasarkan pada data anggaran tersebut di tahun 2022 terjadi defisit anggaran, namun dalam hal pembangunan tetap dilakukan utamanya pembangunan yang mencakup program smart village seperti pengadaan kantor desa baru, revitalisasi trotoar, sosialisasi program one village one program serta pengadaan sistem informasi desa yang terintegrasi.

2. Transformasi Sosial-Budaya Masyarakat

Pada sub pembahasan yang kedua terkait dengan transformasi sosial budaya masyarakat akan dinilai dari perubahan tata nilai yang berlaku di masyarakat Desa Limpung setelah diberlakukannya program *smart village*.

Pemberlakuan program *smart village* pada dasarnya menciptakan berbagai perubahan tata nilai pada masyarakat Desa Limpung. Terkait perubahan tersebut yang utama adalah pola masyarakat yang cenderung lebih memilih menggunakan media online dalam hal pelayanan publik. Pemilihan penggunaan media daring ini disebabkan adanya kebijakan peralihan dari sebelumnya pelayanan publik yang sepenuhnya dilakukan secara manual kini Pemerintah Desa Limpung menerapkan atau mengimplementasikan kebijakan penggunaan media online dalam menunjang efektifitas dan efisiensi kinerja serta proses pelayanan publik dengan menyesuaikan perkembangan teknologi di era society 5.0.

Perubahan pola masyarakat dalam menggunakan teknologi untuk mengakses pelayanan publik ini juga akan menciptakan dampak lain. Dampak tersebut diantaranya jauh lebih melek teknologi. Selain itu, terjadi pula dampak kebahasaan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik dari sebelumnya yang mengakses secara manual dimana

masyarakat cenderung akan menggunakan Bahasa Jawa secara keseluruhan, namun ketika penggunaan media daring ini masyarakat justru lebih banyak berinteraksi dengan Bahasa Indonesia sesuai dengan template yang telah disediakan oleh Pemerintah Desa.

Selain dampak yang telah disebutkan sebelumnya, pola perubahan ke arah penggunaan teknologi juga memiliki dampak negatif dimana kemudian akan mengurangi intensitas komunikasi langsung dengan lawan bicara dan meningkatkan individualistik pada pelayanan publik. Sebab dalam hal ini masyarakat hanya akan berkomunikasi untuk mengajukan permohonan melalui daring kemudian datang ke Kantor Desa untuk mengambil surat permohonan yang sebelumnya sudah diajukan. Pada awalnya penerapan kebijakan ini ditujukan untuk mempersempit interaksi sosial antar masyarakat di saat pandemic covid -19 sehingga pada masa pasca pandemi seperti sekarang ini sudah seharusnya Pemerintah Desa mulai mengkaji kembali bahwa kebijakan yang diterapkan dimasa pandemic tersebut masih relevan atau sepatutnya sudah mulai dilakukan pengembangan ulang.

Perubahan pola sosial budaya masyarakat dengan diterapkannya program smart village ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut bagi Pemerintah Desa Limpung untuk tetap mempertahankan kearifan lokal yaitu penggunaan Bahasa Jawa Limpung serta produk komoditas lokal yaitu emping melinjo. Sebab pada dasarnya program ini bertujuan untuk mengubah pola pelayanan publik ke arah penggunaan teknologi digital namun dengan tidak meninggalkan kearifan lokal yang sudah ada..

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penjabaran hasil dan pembahasan dapat diketahui bahwa dalam perspektif smart governance beberapa unsur dari implementasi program smart village sudah mulai terimplementasikan. Pemberlakuan digitalisasi pelayanan publik serta penjabaran anggaran pembangunan desa pada infografis sudah dilakukan oleh Pemerintah Desa Limpung. Walaupun pada kenyataannya di tahun 2022 masih terjadi defisit anggaran, namun proses pembangunan utamanya pembangunan terkait program *smart village* masih tetap dilakukan. Pembangunan ini mencakup pengadaan kantor desa baru, revitalisasi trotoar, sosialisasi program one village one program serta pengadaan sistem informasi desa yang terintegrasi. Dalam hal transformasi sosial budaya dalam perspektif *smart governance* pada praktiknya terjadi beberapa perubahan pola kehidupan masyarakat Desa Limpung, utamanya adalah dengan adanya penggunaan media digital dalam hal pelayanan publik menjadikan masyarakat lebih mengerti terkait

penggunaan teknologi, namun disisi lain pola individualitas masyarakat juga meningkat serta pola komunikasi melalui media digital mengalami peningkatan. Sehingga berbagai dampak positif maupun negatif yang terjadi dalam transformasi sosial budaya ini diharapkan menjadi pertimbangan para *stakeholder* terkait khususnya Pemerintah Desa Limpung dan Pemerintah Kabupaten Batang sebagai salah satu pertimbangan dalam kaitannya dengan proses evaluasi dan pengembangan program *smart village* agar kedepan dapat mencapai tujuan utama dari konsep smart village dimana masyarakat mampu menggunakan kemajuan teknologi dengan berpegang pada budaya dan kearifan lokal menuju masyarakat yang berdikari.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Tahir, 2014, Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung : Alfabeta.
- Arwanto, C. P. V., & Wibawani, S. (2022). Implementasi Smart Economy Dalam Pemberdayaan Industri Kecil Menengah Kota Kediri Menuju Smart City. *Perspektif*, 11(2), 451–459. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.5817>.
- Asmara, A. Y., Setiowiji Handoyo. (2015). Pembuatan Kebijakan Berbasis Bukti: Studi Pada Proses Pembuatan Kebijakan Standardisasi Alat dan Mesin Pertanian di Indonesia. *Warta KIML*, 13 (1).
- Berger, P. L. & L. T. (2019). Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan (diterjemahkan dari buku asli *The Social Construction of Reality* oleh Hasan Basari). LP3ES
- Creswell, J. W. (2019). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*. Pustaka Pelajar.
- Fahrina, A. (2022). Analisis Kesiapan Pembangunan Smart City Daerah Studi Kasus: Kabupaten Temanggung. *JATISI (Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi)*, 9(2), 984–995. <https://doi.org/10.35957/jatisi.v9i2.1901>.
- Head, Brian W. (2008). Research and Evaluation Three Lenses of Evidence Based Policy. *The Australian Journal of Public Administration*, 67 (1), 1-11.
- Hochschild, J.L., & Einstein, K. L. (2015). 'It Isn't what we Don't know that gives us trouble, It's what we know that Ain't so: misinformation and democratic politics. *Br. J. Political Sci*, 45 (3), 467–475.

- Jensen, P. H. (2013). What is Evidence Based Policy. Melbourne Institute Policy Brief 4 (13), 3-7.
- Newman, Joshua, Adrian Cherney, Brian W. Head. (2016). Policy Capacity and Evidence-based Policy in The Public Service. Public Management Review, 19, 1-20. 17 April 2018. <https://www.tandfonline.com> Nurhidayati.
- Prasojo. (2018). Introduction to the mini special issue: Understanding Governance in Indonesia. Journal of Policy Studies. Volume 39. Page 581-588. Universitas Indonesia.
- Rossman, G.B. and Rallis, S.F. (2012) Learning in the Field: An Introduction to Qualitative Research. 3rd Edition, Sage, Los Angeles.
- Tangkilisan, HeselNogi. 2003. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.
- Tarasov, A. N. (2016). Theoretical-methodological bases of the “sociocultural transformation” concept explication. International Journal of Environmental and Science Education, 11(18), 11993–12003
- The Pew Charitable Trust dan Mac Arthur Foundation. (2014). Evidence-Based Policymaking A guide for effective government. Diakses pada 1 September 2022 dari <http://www.pewtrusts.org/~media/assets/2014/11/evidencebasedpolicymakingguideforeffectiv egovernment.pdf>.
- Shabrinawati, A., & Yulastuti, N. (2020). Komponen Smart Governance Berdasarkan Konsep Smart Village. Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi Dan Pembangunan), 21(2), 141. <https://doi.org/10.31346/jpikom.v21i2.3020>. Smart Village. Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi Dan Pembangunan), 21(2), 141. <https://doi.org/10.31346/jpikom.v21i2.3020>